

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. IHK DKI Jakarta bulan Januari 2021 sebesar 106,11. IHK bulan Februari 2021 naik menjadi 106,30 dan IHK bulan Maret tahun 2021 naik lagi menjadi 106,36. b. Inflasi DKI Jakarta pada bulan Januari 2021 sebesar 0,14% (mtm); inflasi bulan Februari 2021 sebesar 0,18% (mtm) dan inflasi bulan Maret 2021 sebesar 0,06% (mtm). Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan permintaan masyarakat yang masih terbatas sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial yang masih terus berlanjut ditengah pasokan yang memadai. Selain itu, inflasi yang rendah juga didukung oleh menurunnya ekspektasi inflasi, terkendalinya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti tarif transportasi dan energi, semakin efektifnya program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. c. Komoditas teratas penyebab inflasi Jakarta: - Januari: Cabai Rawit (0,04%), Tempe (0,03%), Cabai Merah (0,03%), Daging Sapi (0,02%) dan Tahu Mentah (0,02%). - Februari: Angkutan udara (0,04%), Beras (0,02%), Cabai rawit (0,02%). - Daging ayam ras (0,05%), Bayam (0,02%) dan Kangkung (0,02%). d. Risiko Inflasi yang perlu diwaspadai ke depan adalah prakiraan curah hujan di Indonesia terutama daerah-daerah pemasok pangan untuk DKI Jakarta dan peningkatan harga komoditas global juga berpengaruh ke inflasi DKI Jakarta serta peningkatan kebutuhan pangan dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri di bulan April-Mei 2021 perlu diantisipasi. Peningkatan mobilisasi masyarakat karena semakin banyak masyarakat yang sudah divaksinasi pada periode libur lebaran diperkirakan dapat mendorong tekanan inflasi ke depan. Selain itu, terdapat potensi tekanan inflasi DKI Jakarta berasal dari subkelompok makanan yang masih mengalami kendala di pasokan dan tekanan peningkatan harga seperti bawang merah yang stoknya semakin menipis karena telah berlalunya masa panen, minyak goreng sejalan dengan masih meningkatnya harga CPO dunia, dan peningkatan harga daging sapi impor Australia yang masih terus berlanjut.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan I permasalahan pengendalian inflasi di DKI Jakarta diantaranya: a. Tersendatnya pasokan cabai ke Jakarta karena pengaruh cuaca menjadi penyebab melonjaknya harga cabai. Pengaruh cuaca juga menyebabkan produsen cabai tidak bisa melakukan panen secara maksimal, akibatnya pasokan cabai ke konsumen juga menjadi terbatas. Harga cabai rawit naik rata-rata 46% dibanding bulan sebelumnya. b. Kenaikan harga kedelai yang dicatat oleh The Food and Agriculture Organization (FAO) sebesar 6% pada Desember 2020 menjadi penyebab naiknya harga makanan tempe dan tahu yang berbahan kedelai. Kenaikan harga kedelai dunia juga sejalan dengan peningkatan permintaan dari Tiongkok c. Kenaikan harga sapi Australia akibat penurunan pasokan di negara importir utama sementara produksi daging sapi dalam negeri belum bisa memenuhi konsumsi dalam negeri menyebabkan kenaikan harga daging sapi domestik d. Pemerintah mulai Oktober s.d. Desember 2020 memberikan subsidi tiket pesawat dalam rangka membantu dunia penerbangan yang lesu di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi sejak Februari 2021 harga tiket pesawat kembali ke harga normal dan ada peningkatan mobilitas masyarakat pada momen libur Tahun Baru Imlek yang mengakibatkan harga tiket pesawat naik. e. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di beberapa daerah termasuk daerah-daerah penghasil padi seperti Indramayu dan Kerawang yang merupakan lumbung padi terbesar. Luasnya lahan sawah yang puso/gagal panen dan tersendatnya distribusi beras akibat banjir tidak bisa menahan laju inflasi dan menyebabkan harga beras naik secara rata-rata 1%.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Strategi Pengendalian Inflasi 4K Triwulan I-2021 di Jakarta meliputi: a. Keterjangkauan Harga - Program Pangan Murah, merupakan program untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan murah terjangkau dengan kualitas baik dan juga merupakan bagian dari upaya penstabilan harga pangan - Belanja Murah awal Tahun 2021, promo belanja murah yang bisa didapatkan di toko-toko Jakpreneur, Mini DC dan kantor kelurahan-kelurahan. - Pemantauan pasokan beras di PIBC, BUMD Pangan DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya terus melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan harga beras di DKI Jakarta terpenuhi dan harga beras tetap stabil b. Ketersediaan Pasokan - Stabilitas Pasokan Daging, BUMD Pangan DKI Jakarta Perumda Dharma Jaya memiliki stok daging sapi yang cukup dan melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan daging di masyarakat. - Contract Farming, Kerjasama antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan PT Sanghyang Seri diawal tahun 2021 ini ditingkatkan menjadi Contract Farming. Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras untuk warga Jakarta tetap aman dan terjaga. - Impor Daging Kerbau, Daging kerbau bisa menjadi salah satu alternatif kebutuhan konsumsi daging selain daging sapi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Bulog dan Perumda Dharma Jaya akan berkoordinasi terkait penyediaan daging kerbau impor untuk pemenuhan warga DKI Jakarta. c. Kelancaran Distribusi - Penjualan produk pangan secara online, PT Food Station Tjipinang Jaya mempermudah pelayanan belanja konsumen dengan memanfaatkan situs jual beli online dan jasa layanan antar. Program ini berkolaborasi dengan beberapa marketplace seperti, Shopee, Tokopedia, Lazada, GrabMart, Blibli, dan Bukamall. - Layanan Food Truck Daging Goes to Kelurahan. Layanan Food Truck dilaksanakan di beberapa Kelurahan di DKI Jakarta dengan jadwal yang diumumkan di media sosial milik Perumda Dharma Jaya. Layanan ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan memudahkan konsumen untuk membeli berbagai produk Perumda Dharma Jaya. - Fasilitas Pelaku UMKM, PT Food Station Tjipinang Jaya membangun 100 kios di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jatinegara, Jakarta Timur. Kios-kios ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mayoritas bergerak di bidang kuliner dan melalui kios ini aktifitas penjualan dan distribusi barang kepada masyarakat akan lebih tertib. d. Komunikasi Efektif - TPID DKI Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021 melaksanakan pertemuan koordinasi dengan agenda pemaparan program kerja Tahun 2021 yang dihadiri oleh Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Biro Perekonomian dan Keuangan, PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya dan Perumda Dharma Jaya. - Kesiapan pangan DKI Jakarta menjelang bulan Ramadhan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan komunikasi efektif dan meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kebutuhan pangan menjelang Ramadhan, cadangan pangan masyarakat dipastikan cukup menjelang bulan puasa. - Harga Komoditas DKI Jakarta, Perkembangan harga-harga komoditas pangan di DKI Jakarta bisa diakses masyarakat melalui website <https://infopangan.jakarta.go.id/> dan aplikasi IPJ di android. Informasi pangan DKI Jakarta ini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan mendapat informasi pangan terkini.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2021 menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Semua kebijakan pembatasan tersebut menyebabkan mata pencarian atau penghasilan sebagian masyarakat Jakarta terdampak. Karena itu program kerja TPID kedepan perlu diantisipasi untuk: - memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak

COVID-19; - menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat; - menahan kenaikan angka kemiskinan di Jakarta; - mendukung pengembangan kewirausahaan UMKM Jakpreneur untuk mendukung pemulihan ekonomi. b. Dinas Sosial, Bank DKI dan Organisasi Perangkat Daerah terkait perlu memastikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak COVID-19, disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. c. Perlu upaya penguatan koordinasi antara TPID Provinsi DKI Jakarta dengan TPID daerah lain dalam rangka: - penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas atau berada di luar Jakarta. - penjualan produk-produk UMKM untuk membantu pemulihan ekonomi daerah - penguatan penggunaan sistem informasi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. d. BUMD Pangan perlu melakukan inovasi untuk menjaga ketahanan pangan di Jakarta, melakukan penganekaragaman pangan dan memantau keamanan pangan. e. Perlu upaya komunikasi efektif agar masyarakat tidak menimbun barang dan melakukan pembelian barang kebutuhan pokok secara wajar. f. Perlu ada antisipasi kenaikan kebutuhan pangan pada triwulan II-2021 pada saat bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. g. Perlu ada pengawasan untuk memastikan tidak ada penimbunan komoditas pangan strategis.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian agar : -Melaporkan stok pangan dan perubahan harga harian komoditas strategis. - Memetakan dan mengantisipasi kenaikan permintaan kebutuhan pangan menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Lebaran. - Memantau dan menjaga ketersediaan stock pangan di Jakarta khususnya menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Lebaran. - Mengembangkan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) di Jakarta dengan daerah-daerah pemasok pangan. b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar: - Melakukan monitoring harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan lain-lain. - Melakukan kegiatan monitoring Harga Barang Penting dilakukan di Toko Bangunan, Pangkalan LPG, dan Toko Pupuk yang ada di 5 Wilayah Kota Administrasi. - Melaksanakan kolaborasi dengan startup, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan program kewirausahaan Jakpreneur UMKM Goes digital untuk mendukung program pemulihan ekonomi. c. BUMD Pangan PT Food Station Tjipinang Jakarta, Perumda Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya agar : - Memastikan supply pangan di Jakarta berada dalam kondisi aman dan meningkatkan kerja sama antardaerah di sentra produksi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. - Meningkatkan kemudahan distribusi pangan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 6M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama dan mengurangi mobilitas). - Melakukan inovasi dan diversifikasi produk pangan di Jakarta. - Meningkatkan kerja sama dengan market place untuk menambah saluran pendistribusian produk pangan. d. Seluruh anggota TPID Provinsi DKI Jakarta agar tetap melakukan upaya terbaik dalam pengendalian inflasi dengan melaksanakan strategi 4K dan melakukan inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. e. Seluruh anggota TPID Provinsi DKI Jakarta perlu mendukung program UMKM Jakpreneur Go Digital baik melalui program pelatihan, pendampingan, pemasaran, per mudahan izin berusaha, business matching, pelaporan keuangan, akses permodalan maupun kemudahan mendapat bahan baku produksi. f. TPID Provinsi DKI Jakarta juga tetap mendukung program social safety net untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.